

RINGKASAN

**WAHYU SAPUTRA ANALISIS TINDAK PIDANA PELAKU
NIM 47410101048 PENYELUNDUPAN NARKOTIKA MELALUI
JALUR KEPABEANAN DI LHOKSEUMAWE
DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN
(Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum. dan Dr. Joelman
Subaidi, S.H., M.H.)**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarag adanya penyelundupan narkotika melalui jalur kepabeanan. Di Lhokseumawe, penegakan dilakukan secara berlapis oleh DJBC, BNN, Polri, dan Kejaksaan untuk menjerat pelaku berdasarkan unsur perbuatan dan kesengajaan. Namun di Kota Lhokseumawe kasus penyelundupan narkotika masih terjadi, sehingga tujuan hukum belum sepenuhnya tercapai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyelundupan narkotika melalui jalur kepabeanan, hubungan dan penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peran aparat penegak hukum dalam proses penindakan dan penuntutan pelaku penyelundupan narkotika melalui jalur kepabeanan.

Metode penelitian ini adalah yuridis empiris. Lokasi penelitian di Kantor Bea dan Cukai Lhokseumawe, menggunakan data primer dari wawancara dengan Bea Cukai, Polri, dan BNN. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan kemudian dianalisis melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelundupan narkotika melalui jalur kepabeanan pada dasarnya dapat dikenakan Pasal 102 UU Kepabeanan, namun karena objeknya narkotika maka perbuatan tersebut juga memenuhi Pasal 113 UU Narkotika, sehingga terjadi *concursum idealis* dan berdasarkan Pasal 63 ayat (1) KUHP diterapkan ketentuan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu UU Narkotika, sedangkan UU Kepabeanan digunakan untuk menjelaskan modus penyelundupan. Hubungan dan penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilakukan secara *multidoor* melalui sinkronisasi larangan, ancaman pidana, dan kewenangan penyidikan sehingga pelaku dapat dijerat baik dari aspek cara memasukkan barang maupun dari sifat barang terlarang. Peran aparat penegak hukum di Lhokseumawe melibatkan Bea dan Cukai sebagai garda awal untuk penindakan kepabeanan, diikuti BNN dan Polri dalam penyidikan narkotika, serta Kejaksaan dalam penuntutan.

Disarankan agar koordinasi antarpengak hukum serta peningkatan penindakan di titik masuk pabean terus ditingkatkan guna memperkuat efektivitas penegakan hukum narkotika di wilayah Lhokseumawe.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penyelundupan Narkotika, Kepabeanan.

SUMMARY

WAHYU SAPUTRA **ANALYSIS OF THE CRIMINAL LIABILITY OF
NIM 47410101048** **PERPETRATORS OF NARCOTIC SMUGGLING
THROUGH CUSTOMS CHANNELS IN
LHOKSEUMAWE IN VIEW OF LAW NUMBER 17 OF
2006 ON CUSTOMS
(Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum. and Dr. Joelman Subaidi,
S.H., M.H.)**

The State has provided a legal basis to prosecute narcotic smuggling through customs channels under Law Number 17 of 2006 on Customs and Law Number 35 of 2009 on Narcotics, with the aim of deterring perpetrators and disrupting cross-border narcotic distribution. In Lhokseumawe, enforcement is carried out in multiple layers by the Directorate General of Customs and Excise (DGCE), the National Narcotics Agency (BNN), the Police, and the Public Prosecutor's Office to prosecute perpetrators based on the act and intent. However, narcotic smuggling cases still occur in Lhokseumawe City, indicating that the objectives of the law have not been fully achieved.

This research aims to identify and analyze the form of criminal liability imposed on perpetrators of narcotic smuggling through customs channels, the relationship and implementation of Law Number 17 of 2006 on Customs with Law Number 35 of 2009 on Narcotics, and the role of law enforcement agencies in the enforcement and prosecution process against perpetrators of narcotic smuggling through customs channels.

This research applies an empirical juridical method. The study was conducted at the Lhokseumawe Customs Office, using primary data obtained through interviews with Customs, the Police, and BNN. Data were collected through interviews and literature study, and analyzed through the stages of data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing.

The results of the study show that the form of criminal liability for perpetrators of narcotic smuggling through customs channels under Law Number 17 of 2006 on Customs is implemented through the imposition of customs criminal sanctions for the unlawful importation of narcotics, followed by the application of narcotic criminal sanctions. The relationship and implementation of Law Number 17 of 2006 on Customs with Law Number 35 of 2009 on Narcotics is carried out through a multidoor approach by synchronizing prohibitions, criminal sanctions, and investigative authority, enabling perpetrators to be prosecuted both for the method of import and for the illicit nature of the goods. The role of law enforcement agencies in Lhokseumawe involves Customs as the frontline in customs enforcement, followed by BNN and the Police in narcotics investigation, and the Public Prosecutor's Office in prosecution.

It is recommended that inter-agency coordination and enforcement at customs entry points be further strengthened to enhance the effectiveness of narcotic law enforcement in Lhokseumawe.

Keywords: Criminal Act, Narcotic Smuggling, Customs.

